



PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Sulistyorini Ariwibowo¹, Manuel A Todingbua², Naomi Patiung³

1,2,3 Master of Management Study Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia
ariwibowosulistorini@gmail.com (Correspondence)

Keyword:
Implementation, SPIP,
Good Governance

Kata Kunci:
Penerapan, SPIP, Good
Governance.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah hampir memenuhi semua komponen pada SPIP, yaitu terdapat pelatihan bagi pegawai, pemanfaatan teknologi dan Sistem Informasi, ada pembatasan akses terhadap informasi penting, pengawasan secara berkala dan tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan audit. Penerapan SPIP di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah mendukung terciptanya Good Governance.

Informasi Artikel: Diterima: 13-12-2024, Disetujui: 17-12-2024, Dipublikasikan: 21-12-2024

I. PENDAHULUAN

Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur yang masih muda usianya. Provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Kabupaten Nabire, dimekarkan pada tahun 2022 yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah pasal 3 ayat (1) bahwa Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan jaya dan Kabupten Deiyai. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor. 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dikatakan bahwa Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,

memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan penting dalam mewujudkan Good Governance dengan mengontrol dan mengelola aktivitas birokrasi pemerintah. Tujuan dari SPIP adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah merupakan pusat kegiatan operasional kantor Sekretariat Daerah. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana penerapan SPIP pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Karena dengan penerapan SPIP yang tepat pada operasional pemerintahan yang ada diharapkan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperkenalkan sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan pengendalian intern dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Di Provinsi Papua Tengah, Sekretariat Daerah berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali Penerapan SPIP dalam mewujudkan *Good Governance* serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian intern yang lebih efektif.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu alat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Tengah, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi krusial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Provinsi Papua Tengah, sebagai daerah yang baru dibentuk, menghadapi tantangan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan berbagai sumber daya yang terbatas dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, pengelolaan keuangan yang baik menjadi sangat penting. Penerapan SPIP di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah dengan kajian pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia merupakan upaya penting untuk meningkatkan

kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik. SPIP dirancang untuk mendukung terciptanya sistem pengendalian yang efektif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Provinsi Papua Tengah, seperti di daerah lainnya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya publik dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Biro Umum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Observasi dilakukan peneliti pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, peneliti menemukan fenomena terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihubungkan dengan *Good Governance*, yaitu tahun 2025 merupakan tahun awal bagi Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi merupakan proses evaluasi terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021).

Penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola organisasi, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mendukung agenda reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Adapun kriteria penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun Pembaharuan Pertama terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Komponen Penetapan tujuan (Kualitas sasaran strategis dan strategi dalam mencapai sasaran strategis)
2. Komponen Struktur dan Proses (Kualitas proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan lima unsur SPIP)
3. Komponen Pencapaian tujuan (Penilaian atas pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP itu sendiri).

Dan Pembaruan kedua adalah Mekanisme dan skor penilaian terintegrasi dengan parameter manajemen risiko indeks (MRI), Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Untuk itu Peneliti mencoba melakukan penilaian awal pada salah satu komponen dari Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yaitu Penyelenggaraan SPIP pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah merupakan

langkah strategis dalam mewujudkan *good governance*. Dengan memahami latar belakang dan fenomena yang mendasari penerapan SPIP, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan implementasi SPIP yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Latar belakang dan fenomena di atas menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peranan penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Dengan memahami tantangan yang ada dan fenomena yang berkembang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SPIP dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan nantinya dapat memperoleh hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada level yang baik. Sesuai dengan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti menyusun penelitian berjudul "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah".

II. METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini dimulai dengan penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengendalian Intern yang menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan lewat observasi dan wawancara diperoleh hasil bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-undang no. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- 1) Ada pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi;

- 2) Menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam kegiatannya. Implementasi teknologi dan sistem informasi ini digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data keuangan.;
- 3) Adanya pembatasan akses terhadap informasi penting dari pihak yang tidak berkepentingan;
- 4) Ada Pengawasan yang dilakukan secara berkala
- 5) Ada tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan audit
- 6) Belum ada SOP yang terdokumentasi dengan jelas dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu belum ada panduan yang resmi sebagai arahan dalam menjalankan aktivitasnya.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, yaitu:

- 1) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Pegawai
 - a. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pegawai mengenai pentingnya SPIP dalam pengelolaan keuangan. Banyak pegawai yang belum menyadari bahwa SPIP bukan sekedar prosedur administratif tetapi merupakan suatu kerangka kerja yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.
 - b. Untuk mengatasi kendala ini, penting bagi Biro Umum untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai melalui program pelatihan yang komprehensif, serta sosialisasi yang menjelaskan dengan jelas manfaat dan pentingnya SPIP dalam konteks pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan pegawai dapat lebih berkomitmen dan aktif dalam menerapkan SPIP, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya
 - a. Terbatasnya Sumber dana dan Sumber Daya Manusia yang terlatih dapat menjadi kendala dalam penerapan SPIP yang efektif. Karena pegawai yang tidak terlatih mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur dan kebijakan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan. Tanpa pengetahuan yang cukup, pegawai bisa saja melakukan kesalahan dalam proses pengelolaan, yang dapat berakibat pada risiko penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem pengendalian intern bisa menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan inisiatif dalam menerapkan SPIP.
 - b. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi Biro Umum untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai di bidang pengendalian intern. Program pelatihan yang dirancang dengan baik dapat membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dalam konteks SPIP. Dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan pelaksanaan SPIP dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan, serta mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan.

3) Resistensi terhadap perubahan

Beberapa pegawai di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang diusulkan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini terutama terjadi pada pegawai yang telah terbiasa dengan cara kerja lama dan merasa nyaman dengan prosedur yang sudah ada. Ketidaknyamanan terhadap prosedur baru sering kali muncul karena pegawai merasa tertekan untuk beradaptasi dengan sistem yang belum mereka pahami sepenuhnya, sehingga menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian mengenai bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi tugas mereka sehari-hari.

Resistensi ini dapat berakar dari berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat dari penerapan SPIP. Ketika pegawai tidak memahami mengapa perubahan diperlukan atau bagaimana manfaatnya bagi mereka dan organisasi secara keseluruhan, mereka cenderung menolak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Selain itu, ketidakpastian mengenai hasil dari penerapan SPIP juga dapat menambah kekhawatiran pegawai. Mereka mungkin khawatir bahwa sistem baru akan menambah beban kerja atau malah menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar implementasi sistem ini dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Setiap kendala, seperti kurangnya pemahaman pegawai tentang SPIP, terbatasnya sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terencana. Pertama, peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi pegawai sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang SPIP dan pentingnya pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus menjadi prioritas, termasuk merekrut atau melatih pegawai yang memiliki latar belakang di bidang pengendalian intern.

Membangun dukungan yang kuat dari pimpinan juga sangat penting. Pimpinan harus aktif terlibat dalam proses perubahan, memberikan arahan yang jelas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi SPIP. Selain itu, pendekatan yang melibatkan pegawai dalam proses perubahan, serta memberikan ruang untuk pendapat dan masukan mereka, dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Dengan perhatian dan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan penerapan SPIP di Biro Umum dapat berlangsung dengan baik, menghasilkan

pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja biro, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola keuangan publik.

Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah

Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan Good Governance di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sangatlah signifikan. SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem ini, proses keuangan dapat dilakukan dengan lebih teratur, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diakses dan dipahami oleh publik.

Penerapan peran SPIP dalam mewujudkan *Good Governance* pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, dilakukan sebagai berikut:

- 1) SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 2) Dengan penerapan SPIP, risiko penyimpangan dan korupsi dapat diminimalisir, meningkatkan integritas pemerintahan.
- 3) SPIP mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
- 4) Melalui SPIP, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur.
- 5) SPIP membantu dalam memperkuat akuntabilitas public dengan memberikan laporan yang jelas tentang pengelolaan keuangan.
- 6) Penerapan SPIP menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui peningkatan transparansi dan partisipasi.

Penerapan SPIP juga berkontribusi dalam meminimalisir risiko penyimpangan dan korupsi. Dengan pengendalian yang lebih ketat, risiko terjadinya tindakan koruptif dapat ditekan, yang pada gilirannya meningkatkan integritas pemerintahan. Ketika pegawai memahami pentingnya pengendalian intern, mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2014, menjelaskan bahwa *Good Governance* (tata kelola yang baik) adalah konsep yang mencakup proses pengambilan keputusan, tindakan pemerintah, serta cara pengelolaan sumberdaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dari *konsep Good Governance* meliputi:

- 1) Kepentingan Publik. Kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- 2) Partisipasi dan Keterlibatan. Masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini melibatkan keterbukaan,

- akses informasi, dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari warga negara.
- 3) Kepemimpinan yang Efektif. Pemimpin dan otoritas public harus bertanggung jawab, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam tindakan dan keputusan mereka.
 - 4) Keadilan dan Kepastian Hukum. Sistem hukum harus adil bagi semua, berdasarkan aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak individu.
 - 5) Transparansi dan Akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan harus transparan, artinya informasi yang relevan harus tersedia untuk publik. Selain itu, pemerintah dan lembaga public harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat.
 - 6) Efisiensi dan Efektivitas. Penggunaan sumber daya public harus efisien dan efektif. Hal ini mencakup pengelolaan yang baik terhadap anggaran serta pencapaian tujuan yang diinginkan.
 - 7) Responsivitas Pemerintah harus responsive terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi.
 - 8) Ketertiban dan Kestabilan. Pemerintah yang baik harus menciptakan dan menjaga kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang stabil serta berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan perkembangan yang berkelanjutan dalam suatu negara atau organisasi. Baik sector public maupun swasta juga memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mencapai kinerja yang optimal serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Lembaga – lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders Consensus of orientation* (Konsensus Orientasi Pemangku Kepentingan). Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif). Accountability. Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Selain itu, SPIP mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi akurat. Dengan sistem pengendalian yang efektif, data keuangan yang dihasilkan akan lebih dapat diandalkan, memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan strategis. Hal ini pun berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik

SPIP juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik. Dengan memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai pengelolaan keuangan, masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran digunakan dan hasil yang dicapai. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penerapan SPIP menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui peningkatan transparansi dan partisipasi. Dengan adanya sistem yang terbuka dan akuntabel,

masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pemerintahan, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi publik dan mendukung terciptanya *Good Governance*. SPIP memainkan peran krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

IV. KESIMPULAN

- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut: dilakukan dengan penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengendalian internal, pelatihan rutin bagi pegawai, mengevaluasi penerapan SPIP secara berkala, Implementasi teknologi informasi dan melibatkan pengawasan dari pihak eksternal.
- 2) 2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, diantaranya: Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Pegawai, terbatasnya Sumber Daya, Resistensi terhadap Perubahan.
- 3) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, memiliki manfaat dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya sistem yang terbuka dan akuntabel, masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan, yang mendorong peningkatan partisipasi public dan mendukung terciptanya *Good Governance*. SPIP berperan krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 2019, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta,
- Br Selian, M. 2024. Pelaksanaan Penilaian sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024. <https://inspektorat.acehutama.go.id/berita/kategori/berita/pelaksanaan-penilaian-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-spip-terintegrasi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-aceh-utama-tahun-2024>
- Creswell, John W. dan Creswell, J. David. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches*. Fifth Edition. California: SAGE Publications.
- Farmanta, Yuswan. 2022. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara menuju Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*. 3(1).52-59.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi, P. 410).
- Linda Felecia Rostan, dkk .2020. Analisis Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.13, No.4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>.

Kurnia, E., & Maulana, I. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan, 1(1), 209–218

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Miles dan Huberman, 2017, Analisis data kualitatif, UI-press, Jakarta.

Mu'ah dan Masram .2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo. Zifatama Publisir.

Paneo, F., Sondakh, J.F., & Morasa, J. 2017. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". 8(2). 215-220.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Rahayu, P. 2019. Perpajakan : Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan terbaru. (J. Susyanti, Ed.) (Vol. 17 x 24 cm). Sidoarjo: Indomedia Pustaka. Retrieved from www.indomediapustaka.com

Suratman, Sunarto., Sayidah, Nur., & Ady, Sri Utami. 2024. Implementasi Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam meningkatkan Level Maturitas SPIP. Jurnal Minfo Polgan. 12(2). 2918-2920.

Sutrisno, E. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana

Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah:

Undang-undang Nomor. 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) Nomor 5 Tahun 2021, mengenai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)